

WEEKLY REPORT

MARKET DRIVERS

DOMESTIK

- **Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat terjadi inflasi pada Agustus 2021 sebesar 0,03% mom, lebih rendah dibandingkan bulan sebelumnya yang tercatat inflasi sebesar 0,08% mom (1 September 2021).** Perkembangan ini dipengaruhi oleh deflasi kelompok *volatile food* dan melambatnya inflasi kelompok *administered prices*, di tengah inflasi kelompok inti yang meningkat. Dari 90 kota, 34 kota mengalami inflasi dan 56 kota mengalami deflasi. Inflasi tertinggi terjadi di Kendari sebesar 0,62% mom dan terendah terjadi di Tanjung sebesar 0,01% mom. Beberapa komoditas yang mengalami kenaikan harga pada Agustus 2021, antara lain: minyak goreng, tomat, ikan segar, pepaya, rokok kretek filter, sewa rumah, uang sekolah SD hingga SMA, dan uang kuliah akademi/Perguruan Tinggi. Sementara komoditas yang mengalami penurunan harga, antara lain: cabai rawit, daging ayam ras, cabai merah, bayam, buncis, kacang panjang, kangkung, sawi hijau, dan tarif angkutan udara. Tingkat inflasi Agustus 2021 dibandingkan akhir tahun 2020 yaitu sebesar 0,84% ytd dan tingkat inflasi tahunan dibandingkan Agustus 2020 yaitu sebesar 1,59% yoy.
- **Hingga Agustus 2021, Realisasi dana PEN telah mencapai Rp340,84 triliun atau 45,8% dari pagu Rp744,45 triliun (1 September 2021).** Realisasi ini meliputi Program Kesehatan sebesar Rp80,84 triliun atau 34% dari pagunya Rp214,95 triliun yang digunakan untuk diagnostik, *testing* dan *tracing*, *therapeutic*, untuk biaya perawatan untuk 377.730 pasien, insentif tenaga kesehatan, santunan kematian, serta obat dan APD (alat pelindung diri). Realisasi Program Prioritas mencapai Rp52,30 triliun atau 44,3% dari pagu Rp117,94 triliun untuk program padat karya KL, pariwisata, ketahanan pangan, ICT, dan kawasan industri. Sedangkan Realisasi Program Dukungan UMKM dan Korporasi mencapai Rp48 triliun atau 29% dari pagu Rp162,40 triliun antara lain untuk Usaha Mikro, subsidi bunga penyaluran KUR, imbal jasa penjaminan (IJP) UMKM, IJP korporasi, dan penempatan dana pemerintah di perbankan untuk kredit usaha. Penyerapan Program Insentif Usaha sebesar 50,35% atau Rp56,7 triliun dari total pagunya Rp61,83 triliun untuk insentif pajak penghasilan (PPh) Pasal 21, penurunan PPh Badan, angsuran PPh Pasal 25, PPh 22 Impor, PPh final UMKM, serta diskon pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) kendaraan bermotor serta pajak pertambahan nilai (PPN) bagi sektor properti. Kemudian realisasi untuk Program Perlindungan Sosial (Perlinsos) adalah sebesar Rp102,69 triliun atau 55% dari pagu Rp186,64 triliun meliputi PKH, Sembako, BLT Desa, kartu prakerja dan sebagainya.
- **Bank Indonesia menerbitkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 23/13/PBI/2021 tentang Rasio Pembiayaan Inklusif Makroprudensial (RPIM) bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah yang berlaku efektif pada 31 Agustus 2021 (1 September 2021).** PBI ini diterbitkan sebagai salah satu upaya Bank Indonesia meningkatkan inklusi ekonomi dan membuka akses keuangan serta memperkuat peran UMKM dalam pemulihan ekonomi nasional. Kebijakan ini memberikan opsi yang lebih luas bagi Perbankan untuk berpartisipasi dalam pembiayaan UMKM, perorangan berpenghasilan rendah (PBR) dan pembiayaan yang bersifat inklusif lainnya. Adapun substansi pengaturan dalam PBI ini antara lain meliputi:
 - a. Penjelasan mengenai RPIM oleh Bank beserta cakupannya.
 - b. Kewajiban pemenuhan RPIM yang dilakukan secara bertahap yaitu paling sedikit sebesar 20% (dua puluh persen) pada 2022, 25% (dua puluh lima persen) pada 2023, dan 30% (tiga puluh persen) pada 2024.
 - c. Tata cara perhitungan RPIM.



Sahabat Keluarga Indonesia

Winang Budoyo

Chief Economist

Widya Pratomo

Junior Economist

Investor Relations & Research Division

PT Bank Tabungan Negara
(Persero), TbkMenara BTN Lt. 16
Jl. Gajah Mada No. 1,
Jakarta 10130

Disclaimer

Data diambil dari sumber terpercaya. Laporan harian disusun untuk kepentingan internal. PT. Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk dan/atauafiliasinya, termasuk karyawan tidak bertanggung jawab atas akurasi dan kelengkapan data dari sumber data yang digunakan. Opini dalam Analisa merupakan pendapat pribadi analis dan tidak mewakili perusahaan.

- d. Pelaporan, publikasi, pengawasan, evaluasi dan bantuan teknis.
- e. Penghargaan dan sanksi.

Dengan berlakunya PBI ini, maka PBI Nomor 14/22/PBI/2012 tentang Pemberian Kredit atau Pembiayaan oleh Bank Umum dan Bantuan Teknis dalam rangka Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/12/PBI/2015 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- **Purchasing Managers' Index (PMI) Manufaktur Indonesia yang dirilis oleh IHS Markit pada Agustus 2021 naik ke level 43,7, meningkat dibandingkan level Juli yang tercatat 40,1 (2 September 2021).** Angka di atas 50 menunjukkan ekspansi sedangkan di bawah 50 menandakan kontraksi. Meski membaik dibandingkan posisi Juli, output dan permintaan baru masih terkontraksi pada bulan Agustus. Hambatan pada produksi dan permintaan ini disebabkan oleh eskalasi kasus Covid-19, meski tekanan tersebut sedikit mereda seiring puncak kasus di bulan Juli yang telah terlewati. Permintaan ekspor baru juga masih tercatat menurun meski dalam kisaran yang lebih lambat. Perusahaan masih mewaspadaai gelombang kedua Covid-19, sehingga masih terdapat pengurangan tenaga kerja. Kebijakan WFH dan absen kerja karena Covid-19 menyebabkan penurunan kapasitas perusahaan. Hal ini tercermin dari peningkatan akumulasi penumpukan pekerjaan. Dari sisi pembelian dan stok, perusahaan juga mengurangi aktivitas pembelian meski pada laju yang lebih rendah dibandingkan Juli. Kendala pengiriman yang masih disebabkan oleh gangguan Covid-19 menyebabkan perpanjangan waktu pemenuhan pesanan selama 19 bulan berturut-turut. Selain karena kendala tersebut, permintaan yang masih menurun juga membuat stok barang jadi di sektor manufaktur tercatat meningkat. Sementara dari sisi harga, Covid-19 terus menyebabkan kenaikan biaya input dan output. Kenaikan harga bahan baku membuat akselerasi inflasi harga input yang tercepat sejak Januari 2014. Perusahaan masih meneruskan sebagian beban biaya kepada klien sehingga biaya output juga tercatat menguat.

- **Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mencatat penyaluran FLPP hingga 31 Agustus 2021 senilai Rp13,98 triliun atau 128.123 unit (2 September 2021).** Penyaluran tersebut setara dengan 81,35% dari target yang ditetapkan oleh Pemerintah sebanyak 157.500 unit. Dengan demikian, penyaluran dana FLPP sejak 2010 hingga 2021 mencapai 892.978 unit senilai Rp69,58 triliun. Saat ini, terdapat 40 bank pelaksana yang telah bekerjasama dan menyalurkan FLPP. Bank penyalur dana FLPP tertinggi yaitu Bank BTN sebanyak 69.454 unit, BTN Syariah sebanyak 14.475 unit, BNI sebanyak 13.350 unit, BRI sebanyak 7.235 unit, dan BSI sebanyak 3.712 unit.

- **Otoritas Jasa Keuangan memutuskan untuk memperpanjang masa relaksasi restrukturisasi kredit perbankan selama satu tahun dari 31 Maret 2022 menjadi 31 Maret 2023. Perpanjangan relaksasi restrukturisasi kredit ini juga berlaku bagi BPR dan BPRS (2 September 2021).** Keputusan tersebut diambil untuk terus menjaga momentum percepatan pemulihan ekonomi nasional dan stabilitas perbankan serta kinerja debitur restrukturisasi Covid-19 yang sudah mulai mengalami perbaikan. Perpanjangan relaksasi restrukturisasi kredit merupakan bagian dari kebijakan *countercyclical* dan menjadi salah satu faktor pendorong yang diperlukan untuk menopang kinerja debitur, perbankan, dan perekonomian secara umum. Perpanjangan restrukturisasi hingga 2023 diperlukan dengan tetap menerapkan manajemen risiko, mengingat adanya perkembangan varian delta dan pembatasan mobilitas, sehingga butuh waktu yang lebih bagi perbankan untuk membentuk Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) dan bagi debitur untuk menata usahanya agar dapat menghindari gejala ketika stimulus berakhir. Penerapan manajemen risiko dalam relaksasi restrukturisasi tetap menjadi pedoman dalam pelaksanaan kebijakan ini yang terdiri dari:

- a) Kriteria debitur restrukturisasi yang layak mendapatkan perpanjangan. Penerapan self assessment terhadap debitur yang dinilai mampu terus bertahan, masih memiliki prospek usaha, dan oleh karena itu layak mendapatkan perpanjangan.
- b) Kecukupan pembentukan CKPN. Terhadap debitur-debitur yang dinilai tidak lagi mampu bertahan setelah diberikan restrukturisasi pada tahap pertama, bank diminta mulai membentuk CKPN.
- c) Prasyarat Pembagian Dividen. Dalam hal bank akan melakukan pembagian dividen, agar mempertimbangkan ketahanan modal atas tambahan CKPN yang harus dibentuk untuk mengantisipasi potensi penurunan kualitas kredit restrukturisasi.
- d) Stress testing dampak restrukturisasi terhadap permodalan dan likuiditas Bank.

- **Ketentuan lengkap POJK perpanjangan relaksasi restrukturisasi kredit akan segera dikeluarkan, dan berlaku sampai dengan 31 Maret 2023 (2 September 2021).** Dalam POJK ini akan mengatur penetapan kualitas aset dan restrukturisasi kredit atau pembiayaan yang mendukung stimulus pertumbuhan ekonomi terhadap Bank Umum Konvensional (BUK), Bank Umum Syariah (BUS), atau Unit Usaha Syariah (UUS) serta debitur yang terkena dampak penyebaran Covid-19 termasuk debitur usaha mikro, kecil, dan menengah. Sementara mengenai ketentuan dana pendidikan perbankan, kualitas Agunan Yang Diambil Alih (AYDA) serta *Liquidity Coverage Ratio* (LCR) dan *Net Stable Funding Ratio* (NSFR) serta *Capital Conservation Buffer* (CCB) tetap hanya akan berlaku sampai 31 Maret 2022. Sebelumnya, OJK pada Maret 2020 telah mengeluarkan kebijakan *quick response* atas dampak penyebaran Covid-19 dengan menerbitkan POJK 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran Covid-19 yang berlaku sampai dengan 31 Maret 2021. Kemudian, dengan mempertimbangkan kondisi pandemi menjelang akhir tahun 2020 yang belum menunjukkan perbaikan, OJK melalui POJK No. 48/POJK.03/2020 tentang Perubahan atas POJK Stimulus Covid-19 melakukan perpanjangan kebijakan relaksasi dengan menekankan kewajiban penerapan manajemen risiko dan prinsip kehati-hatian dalam penerapan stimulus, serta menambahkan kebijakan terkait dengan likuiditas dan permodalan bank hingga 31 Maret 2022. Per posisi Juli 2021, *outstanding* restrukturisasi Covid-19 sebesar Rp 778,9 triliun dengan jumlah debitur mencapai 5 juta dan 71,53% di antaranya adalah debitur UMKM. *Outstanding* kredit restrukturisasi Covid-19 ini menunjukkan penurunan bila dibandingkan dengan posisi di awal penerapan stimulus.

Winang Budoyo
Chief Economist

Widya Pratomo
Junior Economist

Investor Relations & Research Division
PT Bank Tabungan Negara
(Persero), Tbk

Menara BTN Lt. 16
Jl. Gajah Mada No. 1,
Jakarta 10130

Disclaimer

Data diambil dari sumber terpercaya. Laporan harian disusun untuk kepentingan internal. PT. Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk dan/atau afiliasinya, termasuk karyawan tidak bertanggung jawab atas akurasi dan kelengkapan data dari sumber data yang digunakan. Opini dalam Analisa merupakan pendapat pribadi analis dan tidak mewakili perusahaan.

MARKET IMPACTS

- **Dari Indikator Pasar Keuangan Indonesia di Tabel 2, dapat kita lihat bahwa terjadi perubahan kondisi dalam satu minggu terakhir:**
 - **IHSG menguat sebesar 1,42% dalam seminggu terakhir** yaitu dari 6.041 ke 6.127. Jika dibandingkan akhir tahun 2020 masih menguat sebesar 2,48% ytd. Prospek pemulihan ekonomi pada semester II oleh Pemerintah serta penurunan kasus Covid-19 dan pelanggaran PPKM turut mempengaruhi kinerja pasar saham minggu ini.
 - Dalam satu minggu terakhir, **Rupiah terapresiasi sebesar 1,08%** dari Rp14.418 ke Rp14.263 per USD. Jika dibandingkan akhir tahun 2020 masih terdepresiasi sebesar 1,52% ytd. Apresiasi rupiah selama satu minggu ini disebabkan antara lain yield SBN 10 tahun turun ke level 6,08%, premi CDS Indonesia 5 tahun turun ke level 68,54 serta investor asing mencatat *net inflow* sebesar Rp11,63 triliun.
 - **Yield SBN Rupiah 10 tahun posisinya turun 7 bps ke level 6,08% dalam seminggu terakhir. Posisi ini menjadi 22 bps lebih tinggi dibandingkan posisi akhir tahun 2020 yang sebesar 5,86%.** Sementara yield SBN USD 10 tahun turun 8 bps ke posisi 2,11% dalam seminggu terakhir, dan jika dibandingkan akhir tahun 2020 posisinya lebih tinggi 12 bps.

Tabel 1. Perubahan Beberapa Indikator Pasar

Perubahan Year-to-Date 3 September 2021								
Nilai Tukar		Saham		Obligasi Pemerintah 10Y			Komoditi	
				Negara	Yield	Yield Change		
DXY	2.51%	SENSEX	21.39%	China	2.83%	-31	Coal	120.5%
RUB	1.66%	SPX	20.79%	Japan	0.04%	2	WTI	44.2%
CNY	1.09%	CCMP	18.95%	Italy	0.69%	15	Brent	41.5%
BRL	0.18%	SET	13.80%	Germany	-0.39%	19	Aluminium	36.1%
IDR	-1.52%	NKY	6.14%	Indonesia	6.08%	22	Natural Gas	35.4%
EUR	-2.79%	SHCOMP	3.13%	India	6.16%	30	CPO	17.5%
MYR	-3.14%	JCI	2.47%	Thailand	1.62%	30	Nickel	17.2%
PHP	-3.73%	MXAPJ	0.96%	USA	1.30%	39	Rubber	11.0%
JPY	-6.51%	IBOV	-1.97%	Russia	7.00%	109	Gold	-4.0%
THB	-8.94%	FBMKLCI	-2.68%	Brazil	10.77%	386	Rice	-9.8%

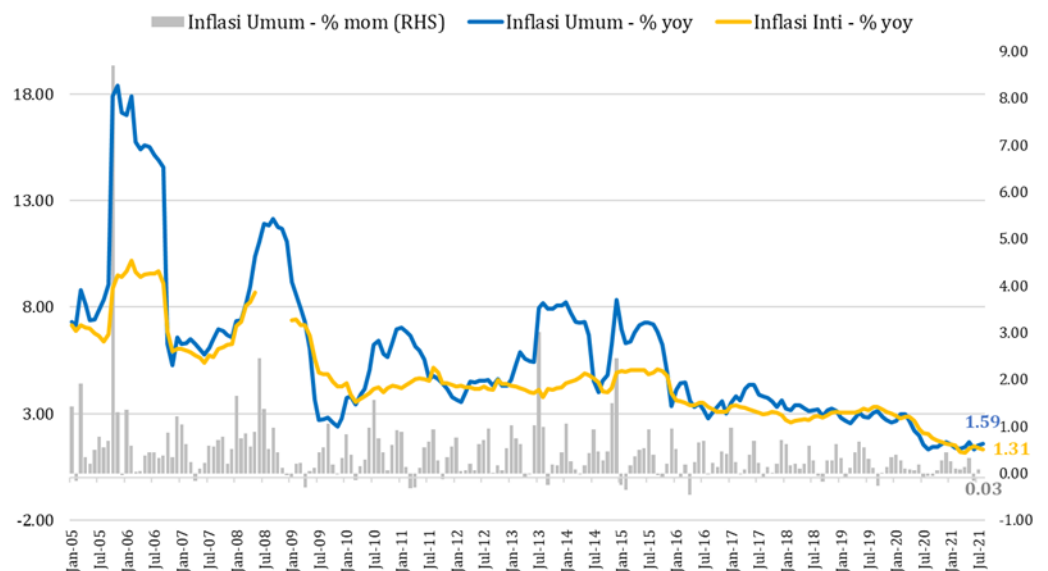
Sumber : Bloomberg

Tabel 2. Indikator Pasar Keuangan Indonesia Mekuat Dalam Seminggu Terakhir

	3-Sep-21	27-Aug-21	Agt 21	Dec 20	27 Agt - 3 Sep (wow)	Agt - 3 Sep (mtd)	Dec 20 - 3 Sep (ytd)
IHSG	6 127	6 041	6 150	5 979	1.42%	-0.37%	2.48%
Rupiah	14 263	14 418	14 268	14 050	1.08%	0.04%	-1.52%
10Y Rupiah Bond Yield	6.08	6.15	6.05	5.86	-7 bps	3 bps	22 bps
10Y USD Bond Yield	2.11	2.19	2.16	1.99	-8 bps	-5 bps	12 bps
CDS Indo 5Y	68.54	72.52	67.80	67.69	-4 bps	1 bps	1 bps

Sumber : Bloomberg

Grafik 1. Perkembangan Inflasi Bulanan dan Tahunan Sejak Januari 2005



Sumber : Bloomberg

Winang Budoyo
Chief Economist

Widya Pratomo
Junior Economist

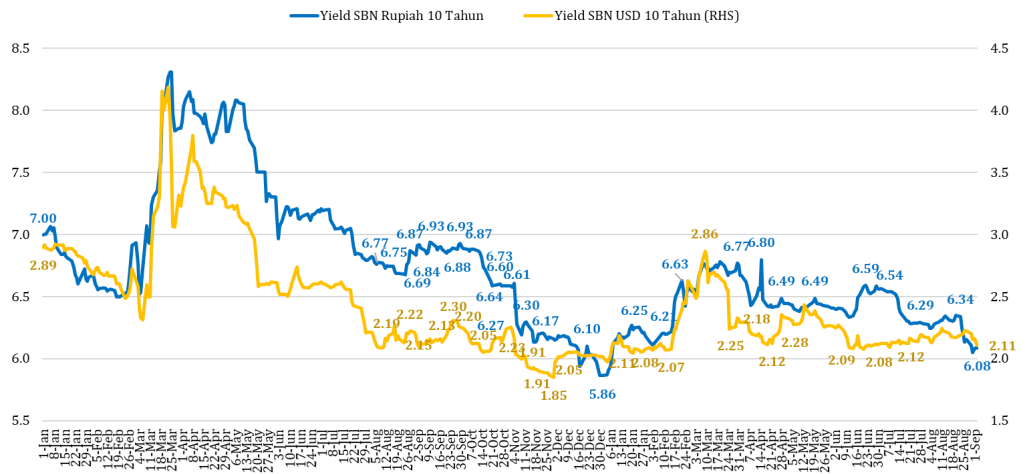
Investor Relations & Research Division
PT Bank Tabungan Negara
(Persero), Tbk

Menara BTN Lt. 16
Jl. Gajah Mada No. 1,
Jakarta 10130

Disclaimer

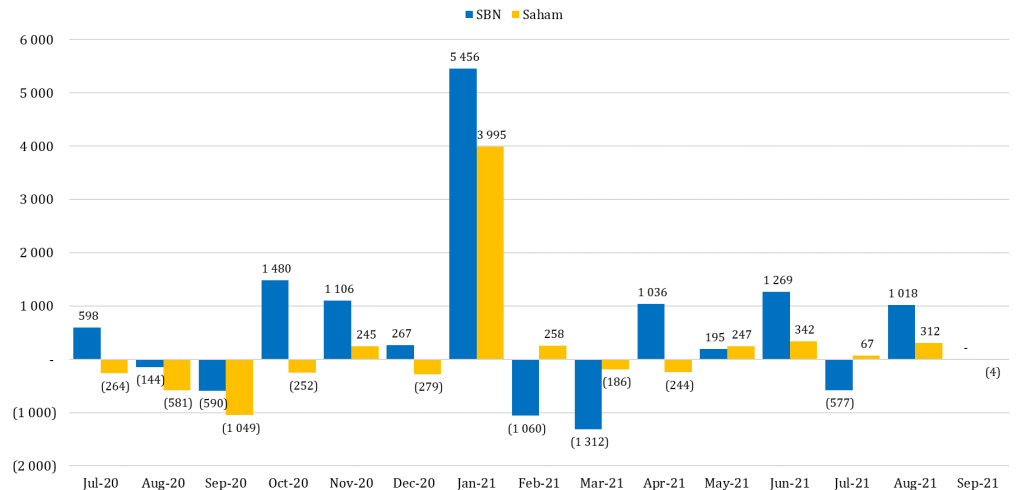
Data diambil dari sumber terpercaya. Laporan harian disusun untuk kepentingan internal. PT. Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk dan/atau afiliasinya, termasuk karyawan tidak bertanggung jawab atas akurasi dan kelengkapan data dari sumber data yang digunakan. Opini dalam Analisa merupakan pendapat pribadi analis dan tidak mewakili perusahaan.

Grafik 2. Perkembangan Yield SBN Rupiah dan Valas 10 Tahun (%)



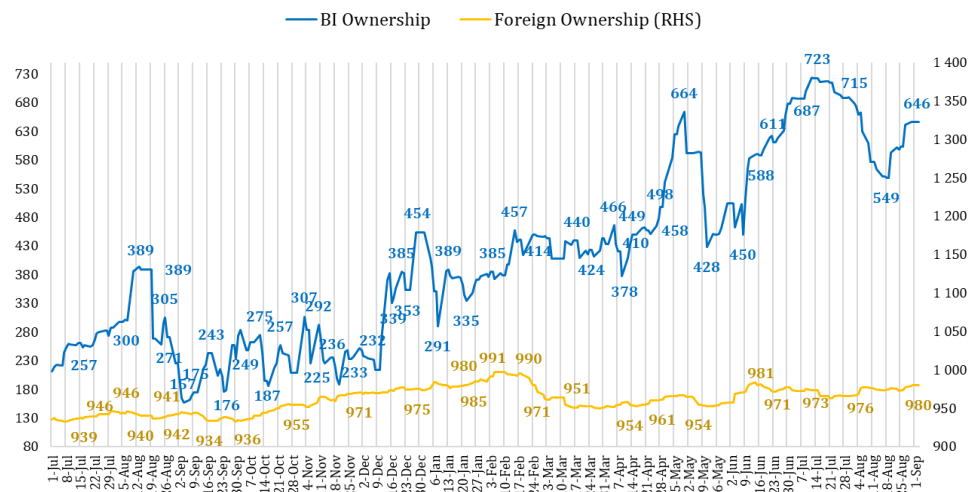
Sumber : Bloomberg

Grafik 3. Net Buy/Sell Investor Asing di SBN dan Saham (USD juta) s.d 3 September 2021



Sumber : Bloomberg

Grafik 4. Kepemilikan SBN oleh Bank Indonesia dan Investor Asing (Rp triliun)



Sumber : Bloomberg

Winang Budoyo
Chief Economist

Widya Pratomo
Junior Economist

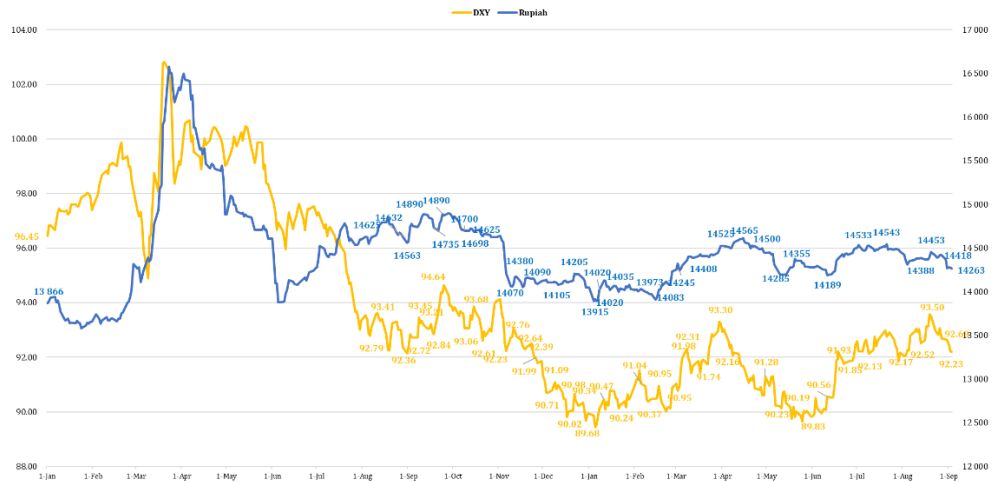
Investor Relations & Research Division
PT Bank Tabungan Negara
(Persero), Tbk

Menara BTN Lt. 16
Jl. Gajah Mada No. 1,
Jakarta 10130

Disclaimer

Data diambil dari sumber terpercaya. Laporan harian disusun untuk kepentingan internal. PT. Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk dan/atau afiliasinya, termasuk karyawan tidak bertanggung jawab atas akurasi dan kelengkapan data dari sumber data yang digunakan. Opini dalam Analisa merupakan pendapat pribadi analis dan tidak mewakili perusahaan.

Grafik 5. Rupiah menguat di tengah kestabilan DXY dalam seminggu terakhir



Sumber : Bloomberg

Grafik 6. Perkembangan Premi CDS Indonesia 5 Tahun



Sumber : Bloomberg

Winang Budoyo
Chief Economist

Widya Pratomo
Junior Economist

Investor Relations & Research Division
PT Bank Tabungan Negara
(Persero), Tbk

Menara BTN Lt. 16
Jl. Gajah Mada No. 1,
Jakarta 10130

Disclaimer

Data diambil dari sumber terpercaya. Laporan harian disusun untuk kepentingan internal. PT. Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk dan/atauafiliasinya, termasuk karyawan tidak bertanggung jawab atas akurasi dan kelengkapan data dari sumber data yang digunakan. Opini dalam Analisa merupakan pendapat pribadi analis dan tidak mewakili perusahaan.